

**ANALISIS DANA DESA TLOGOMULYO
KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN**

Lu'lu'atul Chanifah¹, Teguh Pamudji TN²

Ekonomi Pembangunan, Universitas Sultan Fatah Demak

Abstract

This study aims to analyze the planning and budgeting of financial development of village development in the Gubug District, Grobogan Regency. By using a qualitative approach, primary data was obtained through interviews with Tlogomulyo Village Head and direct observation in the field. Secondary data is obtained from the review literature. The data analysis technique steps include data reduction, data presentation, and conclusion. The results showed that village development planning was prepared in accordance with applicable regulations, but there was a problem in the budgeting of village finance, especially related to the delay in the preparation of village regulations and poor HR quality. Advice for further research is to improve the quantity and quality of the HR implementing team and increase discipline in the management of the village budget.

Keywords: *Development Planning, Financial Budgeting, Village Development, Gubug District.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan dan penganggaran keuangan pembangunan desa di Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa Tlogomulyo serta observasi langsung di lapangan. Data sekunder diperoleh dari literatur review. Langkah-langkah teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan desa telah disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun terdapat masalah dalam penganggaran keuangan desa, terutama terkait keterlambatan

penyusunan peraturan desa dan kualitas SDM yang kurang. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM tim pelaksana serta meningkatkan kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran desa.

Kata kunci: perencanaan pembangunan, penganggaran keuangan, pembangunan desa, Kecamatan Gubug.

A. PENDAHULUAN

Desa telah ada sejak sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memiliki peran penting sebagai unit pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Karena itulah, desa diberi kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri, termasuk dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, dengan melibatkan berbagai pihak di tingkat desa seperti BPD dan organisasi masyarakat.

Salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap pembangunan desa adalah melalui alokasi Dana Desa (DD) dari APBN, sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah tertinggal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses perencanaan dan pengelolaan keuangan pembangunan dilakukan di Desa Tlogomulyo, Kecamatan Gubug, serta apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana perencanaan keuangan pembangunan Desa Tlogomulyo?

2. Bagaimana pengelolaan keuangan pembangunan Desa Tlogomulyo?

B. TINJAUAN TEORI

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya bagi Pembangunan Desa

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Menurut Simon Kuznets (dalam Arsyad, 2010), pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Dalam konteks pembangunan desa, teori-teori ekonomi seperti teori klasik Adam Smith, teori tahapan Rostow, dan teori neo-klasik Solow memberikan dasar penting dalam memahami bagaimana desa dapat mengembangkan potensinya secara berkelanjutan.

Teori klasik menekankan peran kepemilikan dan pembagian kerja dalam mendorong pertumbuhan. Sementara itu, teori tahapan pembangunan Rostow menyoroti pentingnya tahapan yang sistematis dalam proses pembangunan, mulai dari masyarakat tradisional hingga masyarakat konsumtif. Teori neo-klasik dan teori pertumbuhan endogen menjelaskan pentingnya teknologi, modal manusia, dan kebijakan fiskal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Todaro, 2006).

2. Tahapan Pembangunan Desa dan Partisipasi Masyarakat

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa pembangunan desa dilaksanakan melalui tiga tahap utama: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan disusun melalui Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) secara partisipatif. Tahap pelaksanaan pembangunan mengedepankan nilai-nilai lokal dan gotong royong, sementara pengawasan dilaksanakan melalui partisipasi aktif masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

3. Konsep Perencanaan dan Implementasi Pembangunan

Perencanaan pembangunan diperlukan untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia. Siagian (dalam Arsyad, 2010) menyatakan bahwa perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan yang sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam konteks desa, perencanaan yang baik akan memaksimalkan penggunaan Dana Desa dan mendukung pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

4. Pembangunan Infrastruktur sebagai Penggerak Ekonomi Desa

Infrastruktur memegang peran penting dalam memperlancar kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Menurut Siagian, pembangunan infrastruktur adalah upaya terencana yang menunjang terselenggaranya pembangunan secara menyeluruh. Infrastruktur yang memadai dapat membuka akses desa ke pasar, pendidikan, dan layanan kesehatan.

5. Kebijakan Publik dan Peran Pemerintah Desa

Kebijakan publik adalah tindakan terencana yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan

tertentu (Pressman & Widavsky, dalam Winarno, 2007). Dalam konteks desa, kebijakan publik diwujudkan melalui program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBDes. Ciri khas kebijakan publik adalah bersifat mengikat, dilakukan oleh aktor resmi, dan mencerminkan tindakan nyata dari pemerintah (Suharno, 2010).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian berada di Desa Tlogomulyo, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan.

Sumber data terdiri dari:

- a. Data primer: diperoleh langsung dari lapangan, khususnya terkait proses pengumpulan dan penggunaan dana pembangunan desa.
- b. Data sekunder: berasal dari literatur seperti buku dan jurnal yang relevan.

Berdasarkan APBDes Tlogomulyo tahun 2023, seluruh pendapatan desa berasal dari Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp949.911.000, ditambah SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp5.000.000.

Dana tersebut dialokasikan untuk:

1. Pemerintahan desa, seperti operasional kantor, perjalanan dinas, dan rapat koordinasi.
2. Pembangunan desa, mencakup:
 - a. Kesehatan: dukungan untuk polindes, posyandu, makanan tambahan untuk balita dan lansia, pelatihan kesehatan, dan program Desa Siaga Kesehatan.

- b. Sosial budaya: bantuan sosial, peringatan HUT RI, dan Sedekah Bumi.

Wawancara utama dilakukan dengan Kepala Desa, Bapak Sarmo. Dokumentasi diperoleh dari data resmi desa, dan observasi dilakukan langsung ke lapangan.

Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang meliputi:

1. Reduksi data: menyaring data sesuai fokus penelitian.
2. Penyajian data: dalam bentuk narasi atau bagan.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi: untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencocokkan data dengan teori.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Desa Tlogomulyo

a. Kondisi Geografis

Kondisi geografis desa Gubug memiliki topografi datar yang sangat cocok untuk pertanian. Desa ini terletak sekitar 30 KM dari pusat Kota Purwodadi Grobogan dan berbatasan dengan Kecamatan Tegowanu (barat), Kedungjati (selatan), Godong (timur), dan Kabupaten Demak (utara). Desa Gubug merupakan pusat pemerintahan kecamatan dengan berbagai perkantoran, swalayan, pasar umum, sekolah, masjid, puskesmas, dan terminal kendaraan lintas provinsi.

b. Kondisi Ekonomi

Desa Tlogomulyo memiliki mayoritas penduduk sebagai petani atau buruh tani, dan

mereka mengandalkan hasil panen sebagai sumber penghidupan. Kondisi tersebut menyebabkan ekonomi di desa tersebut tergolong ekstrim. Oleh karena itu, peran Pemerintah sangat penting dalam memberikan bantuan pembangunan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah.

c. Keadaan Penduduk

Desa Gubug memiliki luas wilayah 400 Ha dan dihuni sekitar 4415 jiwa dari 1227 KK. Desa ini terletak di dataran rendah sekitar 32 KM dari ibu kota Kabupaten Grobogan.

d. Agama

Mayoritas penduduk Desa Tlogomulyo adalah Muslim, sesuai dengan adat sopan santun dan keramahan yang ada di desa tersebut.

e. Kepala Desa

Kepala desa bertugas sebagai pemimpin pemerintahan desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

f. Sekretaris Desa

Sekretaris desa adalah staf pembantu kepala desa yang bertanggung jawab atas urusan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa.

g. Kepala Urusan

Kepala urusan adalah unsur pembantu sekretaris desa dalam melaksanakan kegiatan

pembangunan, keuangan, dan umum sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

h. Kepala Dusun

Kepala dusun bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya.

i. Ketua RW

Ketua RW adalah perpanjangan tangan kepala desa dan kepala dusun dalam menjalankan pemerintahan desa dan menjaga ketertiban di masyarakat.

j. Lembaga Pendayagunaan Masyarakat (LPM)

LPM adalah lembaga masyarakat di desa yang bertujuan memadukan kegiatan pemerintah dan swadaya masyarakat dalam segala aspek kehidupan untuk mewujudkan ketahanan nasional.

2. Wawancara Kepada Kepala Desa

Dalam sebuah wawancara dengan Bapak Sarmo, seorang kepala desa yang telah mendedikasikan dirinya selama dua dekade untuk membangun Desa Tlogomulyo, kita mendapatkan wawasan yang berharga tentang visi, misi, dan tantangan dalam pembangunan desa. Bapak Sarmo memiliki visi untuk menciptakan desa yang mandiri, berdaya, dan memberikan layanan yang setara kepada seluruh masyarakatnya. Meskipun memiliki semangat yang tinggi, ia mengakui bahwa kendala utama dalam pembangunan adalah dana yang terbatas, namun hal ini diatasi dengan kekompakan warga desa dan

kreativitas dalam memanfaatkan program pemerintah. Pembangunan desa tidak hanya mengenai peningkatan infrastruktur, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

Wawancara dengan kepala desa tentang pembangunan adalah proses untuk mendapatkan informasi dan pandangan kepala desa mengenai program pembangunan di desa tersebut. Hal ini membantu kita memahami lebih dalam tentang proyek-proyek pembangunan yang sedang dilakukan, tantangan yang dihadapi, serta partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Dalam melakukan wawancara, langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain menentukan tujuan wawancara, mempersiapkan pertanyaan, membuat janji wawancara, menghormati kepala desa, mencatat informasi penting, dan mengucapkan terima kasih atas waktu dan informasi yang diberikan.

Melalui wawancara ini, kita juga mendapat insight tentang peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Bapak Sarmo menekankan pentingnya partisipasi aktif warga dalam pembuatan keputusan, pelaksanaan program, dan pengelolaan dana desa. Kesimpulannya, pembangunan desa memerlukan kerjasama erat antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, semangat dan ketulusan pemimpin desa serta partisipasi masyarakat menjadi kunci utama untuk meraih keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan di semua desa di wilayah Kecamatan Gubug telah disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014. Namun, terdapat masalah dalam penganggaran keuangan desa di desa-desa Kecamatan Gubug, terutama dalam penetapan RKP Desa dan APBDesa. Keterlambatan penyusunan peraturan desa disebabkan oleh pagu indikatif dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang diterima oleh kepala desa di semua desa Kecamatan Gubug, serta kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kurang. Proses penyusunan APBDesa didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016, yang mengatur pedoman pengelolaan keuangan desa dalam Kabupaten Grobogan.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM tim pelaksana melalui pendidikan dan pelatihan khusus, serta meningkatkan kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Pemerintah daerah juga diharapkan lebih siap dalam menangani masalah penyusunan APBDesa oleh pelaksana jabatan sementara kepala desa dengan membuat peraturan atau kebijakan yang mengatur perencanaan dan penganggaran keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Meleong, Lexy.J. 2007. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang BersumberDari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Ramadhan, Riza. 2014. Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Bangsri Dengan
- Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007. Universitas Jember Rosalinda, Okta. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (studi kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). Jurnal Ilmiah. Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV
- Setiawan, M. B., & Hakim, A. (2008). Indeks Pembangunan Manusia Manusia. *Jurnal Economia*, 9(1), 18-26, 9(1), 18-26. Uny.ac.id
- Simanjuntak. (1998). *ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KOTA SALATIGA* Oktaviana Dwi Saputri Drs. Hj. Tri Wahyu Rejekiingsih, M.Si. Ekonomi Pembangunan, 3.

Subhan. (2019). Kontribusi Alokasi Dana Desa Pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Indonesian Jurnal of Islamic Economics and Business*, 4.

Sukirno, S. (2011). *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (3rd ed.). PT Raja Grafindo Persada

Sukirno, S. (2011). *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (3rd ed.). PT Raja Grafindo Persada